

Analisis Anggaran Publik dan Non Publik Masa Pandemi (Covid-19) terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat

T. Rifan Handi^{1*}, Saiful Badli²

¹² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teuku Umar

Email : rifanhandi163@gmail.com^{1}, saiful.badli@utu.ac.id²

Alamat: Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681

Korespondensi penulis: rifanhandi163@gmail.com

Abstract. *This research aims to influence the public budget on labor absorption in West Aceh Regency during the Covid-19 pandemic. This research is quantitative research with a Multiple Linear Regression approach. The subjects of this research are public spending (or realization of direct spending), non-public spending (realization of indirect spending) of the West Aceh Regency government for the 2019-2022 Fiscal Year, and the level of labor absorption and the pandemic period during the first semester 2019-second semester 2022 . Research data is secondary data, sourced from BPS and DPKKD West Aceh Regency. The data collection techniques used were observation and interviews. The results of the t test stated that each variable had a significant effect on the level of labor absorption during the pandemic in West Aceh Regency. The public budget variable partially has a positive and significant effect on the labor absorption variable at the 95 percent confidence level, the non-public budget variable has a significant and negative effect at alpha 0.05. Simultaneous hypothesis testing states that the independent variables public budget and non-public budget together have a positive and significant effect on labor absorption in West Aceh Regency during the pandemic. The results of the correlation test show that the direction of the relationship between the public budget and non-public budget is directly proportional to the level of labor absorption in the very strong category. The coefficient of determination states that the variance in the level of labor absorption can be explained by public budget and non-public budget variables of 92.5 percent and the remaining 7.5 percent is explained by variables outside the model.*

Keywords: *Public Budget, Non-Public Budget, Labor Absorption, Covid-19 Pandemic Period.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran publik terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan Regresi Linear Berganda. Subjek penelitian ini adalah belanja publik (atau realisasi belanja langsung), belanja non publik (realisasi belanja tidak langsung) pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019-2022, dan tingkat penyerapan tenaga kerja serta masa pandemi merupakan kurun waktu semester pertama 2019-semester kedua 2022. Data penelitian adalah data sekunder, yang bersumber dari BPS dan DPKKD Kabupaten Aceh Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Hasil uji t menyatakan bahwa masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja pada masa pandemi di Kabupaten Aceh Barat. Variabel anggaran publik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja pada tingkat kepercayaan 95 persen, variabel anggaran non publik berpengaruh signifikan dan negatif pada alpha 0,05. Pengujian hipotesis simultan menyatakan variabel bebas anggaran publik dan anggaran non publik secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa arah hubungan antara anggaran publik dan anggaran non publik berbanding lurus dengan tingkat penyerapan tenaga kerja pada kategori yang sangat kuat. Koefisien determinasi menyatakan bahwa variansi tingkat penyerapan tenaga kerja dapat di jelaskan oleh variabel anggaran publik dan anggaran non publik sebesar 92,5 persen dan sisanya sebesar 7,5 persen dijelaskan oleh variabel di luar model.

Kata kunci: Anggaran Publik, Anggaran Non Publik, Penyerapan Tenaga Kerja, Masa Pandemi Covid-19.

1. LATAR BELAKANG

Pengangguran masih merupakan masalah perekonomian di berbagai tingkat perekonomian, termasuk perekonomian Indonesia yang tergolong sebagai Negara berpendapatan menengah yang menghadapi permasalahan pengangguran sebagai masalah makro ekonomi nasional. Salah satu faktor penyebab peningkatan pengangguran adalah

masalah kesehatan yang mempengaruhi perekonomian secara global dan nasional (Covid-19), dampak dari pandemi pada perekonomian nasional belum sepenuhnya pulih, terutama masalah pengangguran. Pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama dalam perekonomian Indonesia yang tidak hanya memengaruhi individu, tetapi juga berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional, ketahanan sosial, dan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai negara berpendapatan menengah, Indonesia terus menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai untuk menampung jumlah angkatan kerja yang terus bertambah setiap tahunnya, terutama dengan adanya faktor-faktor eksternal seperti pandemi Covid-19, yang memberikan dampak luas terhadap stabilitas ekonomi global maupun nasional. Pandemi ini memaksa pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk melakukan berbagai langkah strategis guna mengurangi dampaknya, seperti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan *refocusing* anggaran yang diarahkan untuk pengendalian penyebaran virus. Namun, langkah-langkah tersebut juga membawa tantangan besar dalam dunia ketenagakerjaan, terutama dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor formal, sementara sektor informal seperti pertanian justru menjadi tumpuan utama bagi banyak tenaga kerja yang terdampak pandemi. Di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Aceh Barat, dampak pandemi terhadap penyerapan tenaga kerja sangat terlihat pada perubahan struktur ekonomi lokal yang beriringan dengan realokasi anggaran publik dan non-publik. Pemerintah daerah menggunakan belanja publik yang berorientasi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan masyarakat untuk mendukung penciptaan lapangan kerja baru, sementara belanja non-publik yang berorientasi pada kebutuhan internal pemerintah cenderung memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran publik dan non-publik terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat selama masa pandemi, sekaligus memberikan gambaran mendalam tentang efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan regresi linear berganda, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah secara optimal.

Data terbaru menyatakan bahwa angkatan kerja nasional saat ini berjumlah 146,62 juta jiwa atau meningkat 2,61 juta jiwa dari tahun 2022, dengan tingkat pengangguran terbuka 5,45 persen dengan tenaga kerja yang terdampak Covid-19 sebanyak 3,60 juta orang atau 1,70 persen dari angkatan kerja (BPS, 2023). Perekonomian nasional pada masa pandemi

mengalami kontraksi yang kuat pada sisi permintaan dan penawaran, yang berdampak pada permasalahan ketenagakerjaan secara nasional (Anita, 2022). Kondisi perekonomian global dan nasional umum pada kurun waktu 2019-2020 mengalami perlambatan yang di akibatkan meluasnya dampak dari virus corona, akibatnya struktur ekonomi nasional pada masa Covid-19 berkontraksi pada beberapa sektor, di antaranya sektor pariwisata, perhotelan, perusahaan retail, terjadinya PMI Manufacturing Indonesia, dan penurunan impor (Yamali & Putri, 2020). Langka pemerintah memberikan stimulus fiskal pada penundaan pajak, kebijakan nonfiskal kegiatan ekspor dan impor, serta stimulus sektor keuangan tidak dapat menekan secara maksimal efek negatif dari penutupan (*lockdown*) yang berdampak langsung pada produksi dan menghambat arus barang (logistik) secara langsung, hingga menimbulkan inflasi yang lebih tinggi pada masa Covid-19 (Tasrif, 2020).

Dalam penelitiannya Awaluddin (2021), menemukan bahwa pada sektor penyerapan tenaga kerja pada masa pandemi, hampir semua sektor secara nasional terjadi anomali penyerapan tenaga kerja, artinya sektor tertentu yang dapat menyerap tenaga kerja dan sebaliknya berbagai sektor mengalami penurunan daya serap tenaga kerja, yang menimbulkan dampak negatif pada tingkat pendapatan yang mendorong kemiskinan meningkat.

Pembangunan daerah secara ekonomi merupakan upaya penciptaan kondisi kesejahteraan masyarakat baik sosial maupun ekonomi. Pencapaian tingkat kesejahteraan yang merata memerlukan pembangunan multidimensi yang bersifat sistematis dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang melibatkan sinergi berbagai pihak, terutama peran aktif pemerintah (publik) maupun peran aktif swasta. Ahli ekonomi memandang bahwa tujuan dari pembangunan adalah usaha peningkatan ketersediaan dan distribusi barang-barang kebutuhan pokok yang di ikuti oleh meningkatnya standar hidup dan terciptanya keluasaan pilihan ekonomi dan sosial bagi masyarakat satu daerah (Todaro, 2011).

Konsep pembangunan yang dikembangkan oleh Rostow untuk perekonomian lepas landas didasari oleh mobilisasi tabungan baik dalam maupun luar negeri untuk menciptakan investasi, yang dapat dilakukan oleh pemerintah baik investasi publik maupun investasi swasta (Todaro, 2011). Pandangan tersebut menyatakan bahwa pada awal perkembangan dan pembangunan di butuh kan persentase yang besar dari investasi pemerintah terhadap total investasi oleh karena penyediaan sarana publik (Prasetyia et al., 2011).

Realisasi anggaran non publik (belanja tidak langsung) pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2019 mencapai 59,44 persen dari total anggaran belanja pemerintah daerah, pada tahun yang sama anggaran publik atau belanja langsung pemerintah Kabupaten

Aceh Barat memiliki proporsi 40,56 persen dari total belanja daerah sebesar Rp1.299.118.001. pada tahun 2020 terjadi peningkatan anggaran non publik dari tahun sebelumnya, dimana realisasi persentase anggaran non publik mencapai 61,12 persen dari total belanja anggaran pemerintah Kabupaten Aceh Barat. pada tahun tersebut belanja anggaran publik mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, pada tahun 2021 total anggaran publik hanya terealisasi sebesar 38,88 persen dari total anggaran belanja daerah. Peningkatan realisasi tingkat anggaran non publik dalam belanja daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021 terus meningkat dari 61,12 pada tahun sebelumnya menjadi 99,96 persen dari total anggaran, namun tingkat koreksi realisasi anggaran publik mencapai 0,04 persen, angka realisasi ini berada jauh dibawah tingkat realisasi pada tahun sebelumnya yang mencapai 38 persen dari total anggaran belanja, bahkan tingkat penurunan realisasi belanja publik pada tahun 2021 merupakan tingkat realisasi anggaran publik terendah pada tahun anggaran 2019-2021.

Pada tahun 2019 tingkat penyerapan tenaga kerja di kabupaten Aceh Barat sebesar 80 persen, meningkat pada tahun 2020 menjadi 93 persen dan berjalan stagnan pada tahun 2021. Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat dominan pada sektor informal dan usaha sendiri. Perbaikan ekonomi pada tahun 2021 tidak diikuti dengan penyerapan tenaga kerja hal ini didorong dari belum tumbuh positif secara keseluruhan sektor ekonomi di Kabupaten Aceh Barat pasca Covid-19. Melambatnya perekonomian pada tahun 2020 dan menurunnya tingkat realisasi belanja modal di tahun 2021 hingga tingkat investasi yang rendah dan terbatas mendorong stagnan pada tingkat penggunaan tenaga kerja di daerah tersebut.

Dampak negatif Covid-19 melahirkan tindakan cepat pemerintah salah satunya adalah upaya *refocusing* dan realokasi anggaran dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, sehingga APBD menjadi instrumen terpenting dalam pengendalian Covid-19 di daerah yang bertujuan untuk meredam *counter-cyclical* berdasarkan fungsi APBD dari sisi *macro economic management* dan *aggregate demand* yang erat hubungannya dengan fungsi fiskal (Sanjaya, 2020). Masalah ketenagakerjaan merupakan hal mendasar di Aceh Barat sehingga menjadi perhatian serius yang membutuhkan penanganan khusus untuk pemecahan masalah pengangguran, faktor kebijakan pemerintah pada pengangguran memiliki dampak langsung dan tidak langsung pada perekonomian daerah salah satunya tingkat penyerapan tenaga kerja. Sehingga sangat perlu di teliti pengaruh anggaran publik dan non publik terhadap penyerapan tenaga kerja.

Tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi lebih dominan terserap di sektor pertanian selain menjadi sektor penyangga ekonomi suatu negara

terutama saat terjadi krisis ekonomi global akibat dampak pandemi Covid-19, dimana banyak tenaga kerja yang di PHK akibat dari kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. tahun 2019 tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebanyak 2,576 dan berjalan stagnan pada tahun 2020. Selanjutnya mengalami penurunan pada tahun 2021 yakni 2,159, Kembali meningkat pada tahun 2022 berjumlah 2,445. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian selama Covid-19 berjalan stabil pada tahun 2019 hingga 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 dan kembali meningkat pada tahun selanjutnya 2022.

Faktor utama yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja di Aceh Barat termasuk investasi pemerintah di sektor pertanian dan kebijakan *fiscal* yang *responsive* selama pandemi. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan adanya ketimpangan antara peningkatan anggaran dan efektivitas penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor formal (Awaluddin, 2021; Yamali & Putri, 2020). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh anggaran publik dan non-publik terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat selama pandemic Covid-19.

2. KAJIAN TEORITIS

Kebijakan yang dilakukan pemerintah melalui pengelolaan defisit anggaran dengan ambang batas defisit di atas 3 persen, kebijakan ini dipayungi oleh Perpu No 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease (Covid-19). seperti yang kita ketahui bahwa secara makro terdapat tiga proses pertumbuhan ekonomi pada berbagai kondisi, yaitu akumulasi, distribusi, dan alokasi. Pada masa covid hampir semua proses pertumbuhan ekonomi Negara mengalami keterlambatan, termasuk sumber-sumber pendapatan Negara dimana kriteria penerimaan negara dari pajak maupun non pajak mengalami penurunan (Sayadi, 2021). Efek negatif Covid-19 dari sisi ekonomi secara nasional yang dirasakan masyarakat antara lain, penyempitan peluang kerja, pemutusan hubungan kerja skala besar, meningkatnya kekerasan, kerugian negara dari sisi materil yang besar (Putri et al., 2020). Pada *refocusing* prioritas anggarannya guna mengatasi pandemi Covid-19 dan realokasi anggaran, belanja yang berkaitan dengan pandemi meliputi 3 (tiga) “sektor” utama yaitu kesehatan, perekonomian, dan jaring pengaman sosial (Aldila & Estiningrum, 2022). Sehingga peranan anggaran pemerintah sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia pada masa pandemi, hingga menjadi tulang punggung struktur perekonomian nasional melalui kebijakan tersebut.

Anggaran publik dan anggaran non publik merupakan belanja daerah, dimana belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda (Darise, 2008). Dengan demikian Anggaran Publik merupakan belanja Pelayanan Publik yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, sedangkan belanja Non Publik adalah Belanja Aparatur Daerah, yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja daerah dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung (anggaran non publik) dan belanja langsung Anggaran Publik. Anggaran Non Publik merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah dari tenaga kerja yang digunakan dalam suatu unit usaha tertentu. Dalam dunia kerja penyerapan tenaga kerja berbeda-beda cara kerjanya, bisa dibedakan sesuai pendidikannya, keahlian khusus atau pengalaman untuk mendapatkan kerja disektor formal (Muhira & Irawan, 2023). Kuncoro (2016) dalam (2022) menjelaskan bahwa penyerapan tenaga kerja yaitu banyaknya lapangan kerja yang tercermin dari banyaknya jumlah penduduk bekerja. Todaro (2003) dalam Lube et al (2021) mendefinisikan penyerapan tenaga kerja adalah diterimanya para pelaku tenaga kerja untuk melakukan tugas sebagaimana mestinya atau adanya suatu keadaan yang menggambarkan tersedianya pekerja atau lapangan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja., banyaknya orang yang bekerja di berbagai sektor dalam suatu waktu dan satuan upah.

Penelitian yang menjadi acuan penelitian ini pernah dilakukan oleh Silalahi & Ginting (2020) dengan judul penelitian Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19 yang menunjukkan pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi melalui pengelolaan anggaran *public* dan non-publik. Ada pula penelitian yang dilakukan oleh Krisnandika et al (2021) dengan judul Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia penelitian ini menunjukkan bahwa pandemic Covid-19 meningkatkan pengangguran secara signifikan akibat pembatasan aktivitas ekonomi, meskipun beberapa sektor informal tetap dapat bertahan.

Hipotesis yang merupakan dugaan awal dari penelitian atas rumusan masalah penelitian, sehingga hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

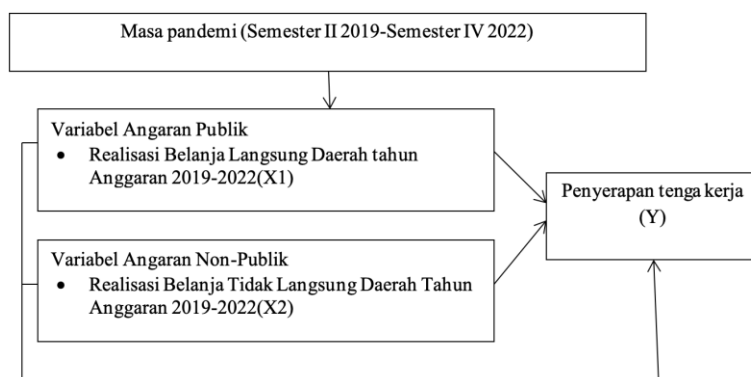
H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh dari variabel Anggaran Publik terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19.

H_1 = Diduga terdapat pengaruh dari variabel Anggaran Publik terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19.

H_0 = Diduga tidak terdapat pengaruh dari variabel Anggaran Non-Publik terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19.

H_1 = Diduga terdapat pengaruh dari variabel Anggaran Non-Publik terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi Covid-19

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh secara simultan dan pengaruh parsial dari belanja sektor publik yang dilihat dari realisasi anggaran langsung daerah Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2019-2022 sebagai variabel bebas pertama (X1), dan pengaruh tidak langsung belanja daerah Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2019-2022 sebagai variabel bebas kedua (X2) terhadap penyerapan tenaga kerja yang menjadi variabel terikat penelitian. Salah satu yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pengujian pengaruh kedua variabel bebas tersebut terhadap perannya pada penyerapan tenaga kerja, pada penelitian sebelumnya *relative* menilai peran pemerintah melalui indikator belanja pada pelayanan publik dan kesesuaian realisasi anggaran, serta fokus *orentasi* realisasi belanja daerah pada masa pandemi. Pendekatan penelitian sebelumnya pada kualitatif penelitian ini menggunakan pendekatan pengujian hipotesis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat dengan subjek penelitian tingkat belanja langsung (anggaran publik), dan tingkat realisasi belanja tidak langsung (anggaran non publik) sebagai variabel bebas, dan tingkat penyerapan tenaga kerja di kabupaten Aceh Barat sebagai variabel terikat. Masa pandemi dalam penelitian ini adalah kurun waktu semester I 2019-Semester II 2022. Data penelitian ini merupakan data sekunder dalam bentuk kurun

waktu yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Aceh Barat dan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Model analisis data penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan regresi linear berganda, pendekatan pengujian hipotesis penelitian ini adalah uji parsial dan uji simultan. Prinsip model regresi linear merupakan suatu model yang parameternya linear (biasa saja modelnya tidak berbentuk garis lurus), dan secara kuantitatif dapat digunakan untuk menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Nachrowi & Usman, 2006). Pendapat Gujarati (2004), model regresi linear berganda pada umumnya dapat ditulis sebagaimana persamaan berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_t$$

Keterangan :

Y	=	Varibabel Terikat
β_0	=	Konstanta
β_1, β_2	=	Koefisien Regresi Variabel Bebas
X_1, X_2	=	Variabel Bebas
e_t	=	Error Term

Untuk menganalisis data pada penelitian ini menggunakan beberapa teknik analisis, yaitu koefisien korelasi (R) untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel bebas dan terikat, serta koefisien determinasi (R²) untuk mengetahui proporsi variasi variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebas. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji F digunakan untuk menguji pengaruh kedua variabel independen secara simultan. Sebelum melakukan analisis regresi, penelitian ini juga menguji asumsi klasik untuk memastikan validitas model yang mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Untuk membatasi masalah dalam penelitian, ini variabel-variabel penelitian yang dimaksud penelitian ini adalah: masa pandemi adalah periode semester I 2019-semester II 2022.

1. Variabel anggaran publik adalah realisasi belanja langsung pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada semester I 2019-semester II 2022.
2. Variabel anggaran non-publik adalah tingkat realisasi belanja tidak langsung Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada semester I 2019- semester II 2022.
3. Penyerapan Tenaga Kerja adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu semester I 2019-semester II 2022

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada periode pandemi per semesternya, dengan tingkat penyerapan terendah terjadi pada semester pertama tahun 2020, dimana wabah pandemi semakin meluas secara nasional. Kemudian penyerapan tenaga kerja tertinggi terjadi pada semester pertama pada tahun 2021 dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 95,2 persen dari jumlah angkatan kerja yang tersedia, meskipun pengamatan di lapangan tingginya penyerapan tenaga kerja dominan pada sektor pertanian, kehutanan, dan hasil kelautan. Sektor tersebut menampung tenaga kerja dari sektor jasa dan angkutan yang terus melambat. Data ini menyatakan bahwa setiap tahunnya pada semester kedua terjadi loncatan penyerapan tenaga kerja, yang rata-rata terserap di atas 80 persen dari total angkatan kerja yang ada di Aceh Barat. Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai tingkat penyerapan tenaga kerja selama pandemi, data tersebut disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1. Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Masa Covid-19 Di Kabupaten Aceh Barat.

Tahun	Penyerapan tenaga kerja (%)		penyerapan tenaga kerja (jiwa)		Rata-rata angkatan kerja per semester
	Semester 1	Semester 2	Semester 1	semester 2	
2019	8,1%	8,0%	3459	3450	42928
2020	7,6%	8,1%	3289	3488	43051
2021	95,2%	90,8%	45395	43395	47784
2022	88,5%	88,5%	43610	43611	49277

Sumber: BPS Aceh Barat 2023.

Adapun Anggaran Publik dan Anggaran Non Publik Masa Pandemi dapat dilihat pada Tabel 2. Realisasi Belanja Publik Dan Belanja Non Publik Masa Pandemi (2019-2022) Kabupaten Aceh Barat, sebagai berikut :

Tabel 2. Realisasi Belanja Publik Dan Belanja Non Publik Masa Pandemi (2019-2022)

Kabupaten Aceh Barat

Uraian	Belanja Publik Tahun Anggaran (Milyar)											
	Pagu anggaran				Realisasi				Persentase			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Belanja Pegawai	529,76	513,60	508,85	503,46	520,87	520,12	463,07	491,14	98,32	100	91,00	97,55
Belanja Barang dan Jasa	295,10	251,99	203,77	219,59	225,66	186,27	213,98	227,45	76,47	73,92	100	100
Belanja Modal	284,53	359,23	286,59	216,77	263,51	351,88	289,19	252,00	92,61	100	100	100
Uraian	Anggaran Non Publik Tahun Anggaran (Milyar)											
	Pagu anggaran				Realisasi				Persentase			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Belanja pegawai	529,76	513,60	508,85	503,46	520,87	520,12	463,07	491,14	98,32	100	91,00	97,55
Belanja lainnya	339,28	344,29	390,78	354,70	356,72	351,88	377,43	360,15	100	100	96,58	100

Sumber: SIKD djpk. Kemenku 2023.

Struktur realisasi anggaran publik atau belanja langsung pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019 terdiri dari belanja pegawai Rp 250,87 milyar atau 98,32 persen dari realisasi belanja daerah. Untuk komponen belanja publik, belanja barang jasa terealisasi sebesar 76,47 persen dari anggaran sementara belanja modal dapat direalisasikan sebesar 92,61 persen dari target anggaran. Tingkat realisasi belanja publik lebih sedikit dibanding dengan realisasi belanja non publik dalam struktur APBD Aceh Barat, dimana pada tahun 2019 tersebut komponen belanja non publik dengan tingkat realisasi yang mencapai 98,32 persen pada belanja rutin pegawai dan 105,14 persen pada komponen belanja lainnya dari target anggaran pada tahun tersebut.

Tingkat realisasi komponen belanja publik Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2020 yang terdiri tingkat realisasi belanja pegawai yang mencapai 101,27 persen dari anggaran dan diikuti oleh realisasi belanja barang dan jasa mencapai 73,92 persen dari target anggaran dan realisasi belanja modal sebesar 75,71 persen dari target anggaran. Pada tahun 2020 tingkat realisasi komponen belanja publik masih rendah bila dibandingkan dengan tingkat realisasi belanja non publik, salah satunya tingkat realisasi komponen belanja lainnya yang mencapai 102,20 persen dari target anggaran. Tingkat realisasi belanja komponen belanja publik pada tahun anggaran 2021 cenderung lebih tinggi dari komponen belanja non publik, pada tahun anggaran 2021 tingkat realisasi belanja pegawai sebesar 91 persen dari target, dan di susul oleh tingkat realisasi belanja barang dan jasa sebesar 105,01 persen dari target anggaran tingkat realisasi belanja modal yang mencapai 100 persen dari target. Sementara realisasi belanja non publik untuk komponen belanja lainnya melambat dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 98,56 persen dari target anggaran.

Tingkat realisasi komponen belanja publik pada tahun anggaran 2022 dalam struktur APBD Aceh Barat di atas 100 persen dari target anggaran. Pada tahun anggaran tersebut belanja barang dan jasa terealisasi mencapai 103,58 persen dari target, yang disusul oleh realisasi belanja modal yang mencapai 116,25 persen dari anggaran. Belanja pegawai terealisasi sebesar 57,55 persen dari target anggaran kemudian realisasi belanja lainya yang mencapai 101,54 persen dari anggaran. Dalam kurun waktu tahun anggaran 2019-2022 APBD Aceh Barat masih mengalami defisit, pada tahun anggaran 2019 APBD Aceh Barat defisit sebesar 124,05 persen dari anggaran atau 32,38 milyar, pada tahun anggaran 2020 APBD Aceh Barat mengalami defisit sebesar 2,71 milyar atau 9,78 persen, dan pada tahun 2022 anggaran Aceh Barat defisit sebesar 9,36 persen, yang di susul oleh tingkat defisit pada tahun 2022 sebesar 1,88 persen (data terlampir). Hal ini cenderung terjadi oleh adanya kebijakan khusus yang memprioritaskan pada pos penanggulangan pandemi Covid-19.

Terdapat juga Hasil Estimasi Regresi Berganda bisa dilihat pada tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Berganda Pengaruh Belanja Publik Dan Belanja Non Publik Di Aceh Barat Masa Pandemi berikut ini :

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Berganda Pengaruh Belanja Publik Dan Belanja Non Publik Di Aceh Barat Masa Pandemi

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
C	-10,77822	1,237460	-8,709957	0,0003
Anggaranpublik	0,111726	0,013671	8,172470	0,0004
Anggarannonpublik	-0,100338	0,012764	-7,860914	0,0005
R-squared	0,947064	Mean dependent var		0,493500
Adjusted R-squared	0,925890	S.D. dependent var		0,443070
S.E. of regression	0,120618	Akaike info criterion		-1,112386
Sum squared resid	0,072743	Schwarz criterion		-1,082595
Log likelihood	7,449544	Hannan-Quinn criter.		-1,313311
F-statistic	44,72711	Durbin-Watson stat		1,120855
Prob(F-statistic)	0,000645			

Sumber: SPSS 2024

Berdasarkan tabel estimasi regresi berganda di atas, diperoleh persamaan regresi berganda analisis Anggaran Publik dan Non-Publik masa pandemi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat sebagai berikut: $PTK = \beta_0 + \beta_1 AGP + \beta_2 ANP + \varepsilon$.

$$PTK = -10,778 + 0,1117 - 0,1003 + \varepsilon$$

Persamaan regresi tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Konstanta

Nilai konstanta yang negatif sebesar 10,778 menyatakan jika tingkat Anggaran publik dan Anggaran Non-Publik bernilai konstan atau tetap maka tingkat penyerapan tenaga kerja selama masa pandemi di Aceh Barat bernilai *negative* sebesar -10,778 persen.

2. Koefisien Regresi Variabel Belanja Publik (X1)

Diketahui bahwa nilai koefisien regresi variabel anggaran publik bernilai positif sebesar 0,111726 , hal ini menyatakan bahwa setiap terjadi peningkatan realisasi anggaran publik atau belanja langsung sebesar 1 milyar rupiah akan di ikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,11 persen.

3. Koefisien Regresi Anggaran Non-Publik (X2)

Nilai koefisien regresi variabel bebas kedua atau anggaran non publik bernilai negatif sebesar -0,100 milyar rupiah, hal ini menyatakan bahwa adanya hubungan yang bertolak belakang antara variabel anggaran non publik dengan tingkat penyerapan tenaga kerja. Nilai koefisien regresi variabel anggaran publik yang negatif bermakna bahwa setiap terjadi

peningkatan jumlah realisasi anggaran non publik sebesar 1 milyar rupiah akan terjadi penurunan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar -0,100 persen.

Variabel Pengujian ini digunakan untuk menganalisis apakah variabel bebas (Belanja Publik, dan Belanja Non-Publik) berpengaruh secara parsial Terhadap variabel Terikat (Penyerapan Tenaga Kerja).

- a. Pengambilan Keputusan Uji t sebagai berikut Jika nilai $\text{sig} < 0,05$ Atau $t \text{ Hitung} > t \text{ Tabel}$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
- b. Jika nilai $\text{sig} > 0,05$ Atau $t \text{ Hitung} < t \text{ Tabel}$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

No	Variable	t-hitung	t-tabel	Prob.	Kesimpulan
1	AGP	8,172470	2,446912	0,0004	Signifikan
2	ANP	-7,860914	-2,446912	0,0005	Signifikan

Sumber: SPSS 2024

Berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial masing-masing variabel berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja pada masa pandemi di Kabupaten Aceh Barat. Variabel anggaran publik secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja pada tingkat kepercayaan 95 persen, sementara variabel anggaran non publik berpengaruh signifikan dan negatif pada tingkat kepercayaan yang sama, hal ini sebagaimana di tunjukkan pada nilai $t\text{-tabel} < t\text{-hitung}$ masing-masing variabel pada tabel di atas.

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

No	F-statistic	= 44,72711
1	F-tabel	= 4,45897
2	Prob(F-statistic)	= 0,000645
3	Kesimpulan	Signifikan

Sumber: SPSS 2024

Berdasarkan tabel hasil pengujian hipotesis simultan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel bebas anggaran publik dan anggaran non publik pada penelitian ini secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi, hal tersebut yang secara teoritis di buktikan degan nilai $F_{hitung} 44,72711 > F_{tabel} 4,45897$ dan nilai probabilitas pengujian $0,00064 < 0,05$.

Tabel 6. Interval Korelasi

No	Interval koefisien	Tingkat hubungan
1	0,00-0,199	Sangat rendah
2	0,20-0,39	Rendah
3	0,40-0,599	Sedang
4	0,60-0,799	Kuat
5	0,80-0,100	Sangat kuat

Sumber: SPSS 2024

Berdasarkan hasil estimasi regresi sebelumnya diketahui tingkat korelasi atau $R = 0,947064$, yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara anggaran publik dan anggaran non publik berbanding lurus (positif) dengan tingkat penyerapan tenaga kerja pada tingkat kerapatan hubungan berada pada interval yang sangat kuat.

Hasil estimasi menyatakan bahwa nilai $R^2 = 0,925$, nilai ini menyatakan bahwa variansi tingkat penyerapan tenaga kerja dapat di jelaskan oleh variabel anggaran publik dan anggaran non publik sebesar 92,5 persen dan sisanya sebesar 7,5 persen dijelaskan oleh variabel di luar model. Melihat hal tersebut bahwa peranan penting investasi pemerintah sangat menentukan tingkat penyerapan tenaga kerja pada masa pandemi, namun secara teoritis tingkat penyerapan tenaga kerja tidak hanya di dorong oleh sektor pemerintah namun juga di tentukan oleh tingkat investasi swasta, pertumbuhan ekonomi, tingkat upah dan tingkat produksi.

Koefisien Determinasi = $R^2 \times 100\% = 0,925 \times 100\% = 92,5\%$.

Pengaruh Anggaran Publik terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Aceh Barat masa Pandemi, Tingkat anggaran publik yang berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada masa pandemi di Kabupaten Aceh Barat, hal menyatakan bahwa tingkat realisasi anggaran publik atau belanja langsung daerah pada masa pandemi memiliki peran dalam perekonomian terutama pada upaya penyerapan tenaga kerja, meskipun pada masa pandemi adanya penurunan penyerapan tenaga kerja seperti pernyataan Awaludin (2021), dimana pada masa pandemi ada sektor tertentu yang mengalami penurunan daya serap tenaga kerja dan sebaliknya terdapat sektor yang dapat menyerap tenaga kerja. Sehingga realisasi belanja publik pemerintah pada penelitian ini memberikan dampak positif dalam distribusi penyerapan tenaga kerja pada masa pandemi di Kabupaten Aceh Barat.

Pengaruh anggaran non publik terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Aceh barat masa pandemi, Pengaruh variabel ini yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja selama periode Covid-19 merupakan salah satu dampak dari alokasi anggaran non publik yang prioritasnya bukan untuk program-program pembangunan langsung, namun merupakan anggaran yang dialokasikan pada pos belanja pegawai, belanja hibah, dan alokasi belanja tak terduga, sehingga secara umum komponen belanja non publik ini tidak terkait langsung dengan

program pembangunan pemerintah yang sedang berjalan. Kecenderungan akan penggunaan anggaran pada operasional rutin daerah ini memberikan dampak negatif pada tingkat penyerapan tenaga kerja secara umum.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kartiko (2020), dimana insentif pajak dalam merespons dampak pandemi Covid-19 pada sektor pariwisata berhasil dalam penanganan pemutusan hubungan kerja. Juga sejalan dengan hasil penelitian Julihandono (2023) yang menyatakan bahwa program padat karya tunai dari dana desa yang telah mampu mengurangi angka pengangguran di pedesaan. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Nurichsan & Setyowati (2023) yang menyimpulkan bahwa belanja pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pada penelitian ini belanja publik dan non publik secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh antara belanja publik dan belanja non publik pada periode 2019-2022 (masa pandemi) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara parsial variabel belanja publik dan non publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi.
2. Secara bersama-sama belanja publik dan belanja non publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di kabupaten Aceh Barat pada masa pandemi.
3. Hasil estimasi data menunjukan bahwa arah hubungan antara anggaran publik dan anggaran non publik berbanding lurus (positif) terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja pada interval yang sangat kuat. Variansi penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variabel anggaran publik dan anggaran non publik sebesar 92,5 persen dan sisanya sebesar 7,5 persen dijelaskan oleh variabel di luar model.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Nursiyono, J., & Makutaning Dewi. (2022). Hubungan Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Melalui Penggunaan Big Data (Studi Kasus: loker.id dan Google Trends). *Jurnal Ekonomi Indonesia* , 11(1), 95–108.
- Aldila, G. R. D., & Estiningrum, S. D. (2022). Kebijakan Refocusing Anggaran dan Strategi Di Masa Pandemi Covid-19. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6, 4125–4133.

- Anita, W. (2022). *The Effect Of Labor Force Participation, Regional Tax Revenues, And Exports On Economic Growth In The Era Of The Covid-19 Pandemic With The Islamic Human Development Index As A Moderation Variable*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Arida, A., Zakiah, & Juliani. (2015). Analisis Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja pada Sektor Pertanian di Provinsi Aceh. *Agrisep*, 16(1), 66–78.
- Awaluddin, M. (2021). *Pergeseran Negatif Kondisi Ekonomi Di Kalimantan Timur Pasca Penyebaran Virus Corona (COVID 19)*. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Samarinda, 17(1), 1–13.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2014). *Electronic Data Processing (Spss 15 Dan EvIEWS)*. Yogyakarta: Danisa Media.
- BPS. (2023). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT. Indeks.
- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika: Teori, Konsep Dan Aplikasi Dengan SPSS 17. . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- Guszalina, S., Kornita, S. E., & Maulida, Y. (2022). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Perempuan Di Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(4), 694 – 702.
- Halim, A. (2014). *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik (2nd ed.)*. Salemba Empat.
- Hasanah, U. (2022). Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Periode 2016-2020. *Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah* Volume 1 Nomor 2 Agustus 2022 EISSN: 2828-1802 Determinan, 1(2), 91–100.
- Herlina. (2020). Perubahan Fluktuatif Struktur Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Al-Mutharahah: *Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 17(2), 199–210.
- Insukindro. 2003. *Ekonometrika Dasar*, Yogyakarta: BPFE UGM
- Iswara, I. W. D., & Yasa, I. N. M. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Ruang Fiskal Terhadap Alokasi Belanja Modal Dan Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 11(2), 633–661.
- Julihandono, C. S. (2023). Efektivitas dan Efisiensi Belanja Prioritas Program Padat Karya Untuk Mengurangi Tingkat Pengangguran Di Masa Pandemi. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik Efektivitas*, 8(2023), 51–62.
- Kartiko, N. D. (2020). Insentif Pajak Dalam Merespon Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Pariwisata. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2(1), 124–137.

- Krisnandika, V. R., Aulia, D., & Jannah, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pengangguran Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP)*, 5(4), 720–729. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i4.2229/http>
- Lube, F., Kalangi, J. B., & Tolosang, K. D. (2021). Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Pdrb Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(03), 25–36.
- Muhira, A. A., & Irawan, E. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja di. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(1), 282–288.
- Nachrowi, N. D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer Dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi Dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Nurichsan, A. R., & Setyowati, E. (2023). Analisis Pengaruh Investasi, Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Belanja Pemerintah Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2021. *PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 49–62.
- Nurjanah, I. (2022). *Analisis Elastisitas dan Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014-2020*. Universitas Islam Indonesia.
- Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2020.
- Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2020.
- Prasetyia, F., Wulandari, F., & Utama, R. S. (2011). Pengeluaran Sektor Publik, Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Eonomi dan Pembangunan Indonesia*, XI, 96–116.
- Putri, M. A., Septyanani, R., Prio, A., & Santoso, A. (2020). *Dampak Covid-19 Pada Perekonomian Indonesia. Seminar Nasional & Call For Paper Hubisintek 2020*, 198–203.
- Ramadhani, Y. C. (2023). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia Impact of the Covid-19 Pandemic on the Indonesian Economy. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(225), 200–212.
- Rezki, I., Elia, A., & Harinie, L. T. (2018). Volume 4 Nomor 2 Palangka Raya, Desember 2018 Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Inflasi, dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya Analysis. *Journal Magister Ilmu Ekonomi* ...,

- Sabihi, D. M., Kumenaung, A. G., & Niode, A. O. (2021). Pengaruh Upah Minimum Provinsi , Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 21(01), 25–36.
- Sabyan, M., & Wiarta, I. (2024). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan (Mankeu)*, 13(01), 179–185.
- Saefuloh, I., & Saefuddin, A. (2019). Elastisitas Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Cimahi Pada Tahun 2015-2019. *The Journal of Pelita Nusa*, 1(1), 1–12.
- Sanjaya, N. (2020). Kebijakan Penganggaran Daerah dimasa Pandemi COVID-19 (Study kasus pada pemerintah daerah provinsi Banten). *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(2), 273–290.
- Sayadi, M. . (2021). APBN 2020: Analisis Kinerja Pendapatan Negara selama pandemi Covid-19. Indonesian Treasury Review: *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(2), 159–171.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167.
- Suaib, A. R. A., & Agustina, N. (2022). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Terdidik Sektor Industri Pengolahan di Pulau Jawa Tahun 2011-2019. Seminar Nasional Official Statistics, 2022(1), 779–788.
- Sugiyono. (2006). *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: CV.Afabeta.
- Susanti, M. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata Di Jawa Timur. *Journal Of Development Economic and Social Studies*, Vol 2 No 3(3), 522–538.
- Tasrif. (2020). Dampak Covid 19 Terhadap Perubahan Struktur Sosial Budaya dan Ekonomi. *EduSociata*, 3(2), 88–109.
- Todaro, M. P. (2011). *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga.Jakarta.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2014.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384.